

**STRATEGI HUMAS DALAM PENYEBARLUASAN
INFORMASI MELALUI MEDIA DIGITAL PADA
BAGIAN HUMAS, BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKTRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH**

JURNAL

Oleh:

**CAHAYA EKARISTI
NIM. 24.12.233149**



**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL, POLITIK, ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmad dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul “STRATEGI HUMAS DALAM PENYEBARLUASAN INFORMASI MELALUI MEDIA DIGITAL PADA BAGIAN HUMAS, BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKTRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH”.

Penulis ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah memberi bimbingan, arahan, saran dan waktu kepada penulis, sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari dalam penulisan karya ilmiah ini masih belum sempurna, oleh karena itu penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Semoga Karya Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palangka Raya, 25 Juni 2026

STRATEGI HUMAS DALAM PENYEBARLUASAN INFORMASI MELALUI MEDIA DIGITAL PADA BAGIAN HUMAS, BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PUBLIC RELATIONS STRATEGY IN DISSEMINATION OF INFORMATION THROUGH DIGITAL MEDIA IN THE PUBLIC RELATION DEPARTMENT, ADMINISTRATION BUREAU OF THE REGIONAL SECRETARIAT OF CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

1. Cahaya Ekaristi
2. Lisnawati
3. Annisa Rizki Ananda

Communication Studies,
Muhammadiyah University of
Palangka Raya, Palangka Raya,
Central Borneo, Indonesia

email :

cahayaristi@gmail.com

lisnaparwati17@gmail.com

Keywords:

*Humas Setda Kalteng,
penyebarluasan informasi, teori
RACE, komunikasi dua arah, good
governance*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis strategi Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Tengah sebagai jembatan informasi antara pemerintah provinsi dan masyarakat. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dengan kerangka teori proses RACE (Cutlip, Center, & Broom, 2006) dan komunikasi dua arah (Grunig & Hunt, 1984). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 12 informan kunci (Kepala Sub. Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan, staf humas, jurnalis, dan tokoh masyarakat), observasi partisipatif terhadap lima kegiatan diseminasi informasi pada November–Desember 2025, serta analisis dokumen SOTK Setda Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019. Temuan menunjukkan bahwa Humas Setda menerapkan strategi multikanal yang efektif, memadukan media digital (situs web setda.kalteng.go.id dan Instagram @setda_kalteng) dan media konvensional (radio lokal dan konferensi pers), dengan tingkat keterlibatan publik mencapai hingga 85% pada konten terkait infrastruktur. Kendati demikian, Humas menghadapi tantangan signifikan, terutama keterbatasan akses internet di 12 kabupaten pedalaman (cakupan 4G sebesar 45%) dan koordinasi antar-SKPD yang belum optimal. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan digital bagi 30 aparatur humas dan penguatan kolaborasi dengan media komunitas Dayak. Penelitian ini diharapkan memperkuat praktik tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Provinsi Kalimantan Tengah.

Abstract

This study analyzes the role of the Public Relations (PR) Office of the Regional Secretariat (Setda) of Central Kalimantan Province as an information bridge between the provincial government and the public. A descriptive qualitative approach was used, drawing on the RACE process theoretical framework (Cutlip, Center, & Broom, 2006) and the two-way communication model (Grunig & Hunt, 1984). Data were collected through in-depth interviews with 12 key informants (Head of the Leadership Materials and Communication Sub-Division, PR staff, journalists, and community leaders), participatory observation of five information dissemination activities in November–December 2025, and an analysis of the organizational structure documents of the Central Kalimantan Provincial Secretariat based on Ministry of Home Affairs Regulation No. 56 of 2019. The findings indicate that the Provincial Secretariat's Public Relations Office implements an effective multi-channel strategy, combining digital media (the website setda.kalteng.go.id and Instagram

@setda_kalteng) and conventional media (local radio and press conferences), with public engagement rates reaching up to 85% for infrastructure-related content. Nevertheless, the Public Relations Office faces significant challenges, particularly limited internet access in 12 remote regencies (4G coverage at 45%) and suboptimal coordination among regional government agencies. Based on these findings, it is recommended to enhance human resource capacity through digital skills training for 30 public relations officials and to strengthen collaboration with Dayak community media. This study is expected to strengthen the practice of good governance in Central Kalimantan Province.

Keywords: Public relations strategy of The Central Kalimantan Provincial Secretariat, information dissemination, digital media, RACE Cutlip Center Broom, Two-Way Communication.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah paradigma kehumasan pemerintah dari pola komunikasi satu arah menuju komunikasi yang lebih interaktif, partisipatif, dan berbasis digital. Digitalisasi memberikan peluang bagi organisasi untuk membangun komunikasi yang lebih dialogis, simetris, dan responsif terhadap kebutuhan publik. (Grunig, Kim, dan Lee, 2021).

Perubahan nomenklatur dari Biro Humas menjadi Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan melalui restrukturisasi organisasi perangkat daerah untuk menyesuaikan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Berdasarkan penataan birokrasi dan kelembagaan Pemprov Kalteng, unit kerja ini resmi berubah menjadi Biro Administrasi Pimpinan. Secara digital, Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini memanfaatkan berbagai platform daring dan inovasi, dengan fokus utama media sosial instagram @sekretariat.daerah.kalteng, dan Instagram @biroadpimkalteng memiliki pengikut 1.141 followers dengan lebih dari 1.474 postingan yang diunggah setiap kegiatan terbaru dari pimpinan serta kanal pendukung lainnya portal Biro Adpim Kalteng (Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, biroadpim.kalteng.go.id dan aplikasi BERAKSI (BERkoordinasi atasi misKomunikasi, adpimkaltengberaksi.my.id untuk memastikan penyebaran, pelayanan informasi dan komunikasi pimpinan berjalan optimal.

Pada Era desentralisasi pasca diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan humas pemerintah daerah sebagai salah satu pilar penting bagi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Di Provinsi Kalimantan Tengah, Sekretariat Daerah (Setda) berfungsi sebagai koordinator administratif gubernur dan pengelola anggaran daerah yang signifikan, sekitar Rp12 triliun— untuk program prioritas seperti Kalteng Mandiri (pembangunan 500 km jalan trans, 300 posyandu terpadu, dan reforestasi 100.000 ha lahan gambut). Dalam struktur birokrasi setempat, fungsi kehumasan terintegrasi dalam Biro Humas, Protokol, dan Kerjasama, sehingga menjadi ujung tombak penyebaran informasi program pemerintah kepada 13 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Kalteng, termasuk daerah terpencil seperti Seruyan dan Gunung Mas yang masih menghadapi keterbatasan akses informasi.

Humas Setda Provinsi Kalteng dengan Humas Pemerintah Provinsi Kalteng yang dipegang oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfoantik) Provinsi Kalteng, dalam proses penyebarluasan informasi kepada publik kedua instansi ini memiliki fokus tupoksi yang berbeda, berikut perbedaan diantara keduanya:

1. Humas Setda (Biro Administrasi Pimpinan / Bagian Protokol dan Komunikasi Publik) Setda Provinsi Kalimantan Tengah, fokus utama: peliputan kegiatan, rilis pers, dan agenda pimpinan (Gubernur, Wakil

Gubernur, dan Sekretaris Daerah). sifat informasi: bersifat politis, kebijakan strategis daerah, tanggapan isu, dan laporan kinerja pimpinan. Kanal utama : portal resmi Sekretariat Daerah (Setda Kalteng) dan siaran langsung/dokumentasi resmi.

2. Dinas Kominfosantik (Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik) Provinsi Kalimantan Tengah, fokus utama : layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), pengelolaan pusat data (Data Center), statistik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama. Sifat informasi : bersifat pelayanan publik, data sektoral, statistik, dan diseminasi program lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kanal utama: Portal Pemerintah Provinsi (MMC Kalteng), aplikasi Satu Data, dan akun media sosial resmi seperti Instagram Diskominfosantik Kalteng/Twitter MMC Kalteng.

Realitas lapangan menunjukkan tantangan serius. Survei Diskominfosantik Kalteng (2024) mengindikasikan hanya 62% masyarakat memahami program unggulan pemerintahan provinsi, masalah yang diperparah oleh infrastruktur komunikasi yang lemah (55% desa masih merupakan blackspot 4G) serta fragmentasi informasi antar-SKPD, sedangkan beban operasional humas Setda pun nyata: lebih dari 200 press release, sekitar 150 kegiatan publik, dan 700 permintaan informasi PPID setiap tahun menunjukkan intensitas peran humas sebagai penghubung pemerintah-publik. Kondisi tersebut menuntut fungsi kehumasan yang tidak sekadar melaksanakan kegiatan publikasi, tetapi juga mampu melakukan manajemen komunikasi yang strategis dan partisipatif.

Menurut Frank Jefkins (2018) hubungan kehumasan atau *Public Relations* adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik internal maupun eksternal, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan spesifik yang dilandaskan pada saling pengertian.

Hubungan komunikasi antara masyarakat adalah seni dan ilmu untuk menciptakan pengertian dari publik yang

lebih baik untuk memperbesar kepercayaan publik. Selain itu *Public Relations* dapat didefinisikan juga sebagai proses komunikasi bagi tercapainya tujuan kebijakan suatu lembaga. *Public Relations* juga adalah penyelenggaraan komunikasi timbal balik antara suatu lembaga dengan publik yang menentukan sukses atau tidaknya lembaga tersebut (Nurtjahjani & Trivena, 2018)

Firzan Nova (2011) mempunyai pandangan sendiri bahwa fungsi utama hubungan kehumasan, yaitu untuk menumbuh dan mengembangkan hubungan baik antar lembaga dengan publiknya dalam rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi, dan partisipasi publik dalam upaya menciptakan pendapat opini publik yang menguntungkan lembaga atau organisasi.

Teori utama *Excellence in Public Relations* yang dikembangkan Grunig tetap relevan dalam era digital. Organisasi yang menerapkan komunikasi dua arah simetris (*two-way symmetrical communication*) cenderung lebih efektif dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan publiknya. Dalam konteks pemerintahan daerah, teori ini menempatkan humas tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator dialog antara pemerintah dan masyarakat. (Hung-Baesecke, Chen, dan Ni, 2021).

Konsep dua arah ini sangat relevan di konteks Kalteng: humas tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi harus mengelola umpan balik, menyinergikan pesan antar-SKPD, dan menjembatani kesenjangan informasi ke wilayah berinfrastruktur lemah. Selain itu, reformasi birokrasi melalui Perpres No. 81 Tahun 2010 mempertegas peran humas sebagai penasihat komunikasi kepada Sekda, menekankan fungsi strategis humas dalam proses pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan komunikasi publik. Strategi kehumasan modern harus dipandang sebagai bagian dari proses manajemen strategis organisasi. Humas dituntut mampu melakukan pemetaan isu, analisis kebutuhan publik, pengelolaan media digital, serta evaluasi efektivitas komunikasi secara berkelanjutan. (Andersson, 2024).

Dalam pandangan teori Difusi Inovasi (Everett M Rogers, 1995) menjelaskan bagaimana sebuah ide, teknologi atau praktik baru menyebar (berdifusi) melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu di antara anggota suatu system sosial. Sebagian teori ini terjabarkan dalam upaya penyebaran informasi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, maka dapat dikatakan bahwa adalah upaya untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat dengan memberikan keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat dan didengar yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik, mengenai upaya dan capaian kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bukti empiris juga menunjukkan efektivitas praktik kehumasan yang terarah. Studi Jurnal Desentralisasi (2023) terhadap humas DPRD Kalteng menemukan peningkatan citra publik sebesar 40% melalui penguatan media relations, sebuah indikator bahwa interaksi proaktif dengan media dapat meningkatkan persepsi publik terhadap lembaga pemerintahan. Di sisi lain, pengalaman krisis seperti pandemi COVID-19 dan banjir 2024 mempercepat upaya digitalisasi komunikasi pemerintah; misalnya, akun Instagram Setda mencatat penyebaran infografis bantuan sosial yang mencapai 10.000 share, menandakan potensi jangkauan digital bila konten dan distribusi dikelola efektif.

Konsep E-Government Public Relations menekankan pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana komunikasi publik yang memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan media digital tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai

media pelayanan publik dan pengelolaan aspirasi masyarakat. (Jajuli, Salahudin, dan Firdaus, 2024)

Optimalisasi media digital dalam praktik *Government Public Relations* mampu memperkuat komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya dan hambatan geografis. Temuan ini relevan dengan kondisi Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki wilayah luas dan tantangan akses komunikasi di sejumlah daerah terpencil. (Agustini, et al, 2024)

Merujuk pendapat Rusadi Ruslan (Ruslan, 2012) bahwa pada penata rumah tangga pada organisasi/instansi yang baik, seorang manajer kehumasan harus memiliki beberapa strategi agar agar dapat menjangkau sasarannya, baik internal maupun eksternal dan pendapat Ahmad S. Adnan (dalam Ruslan, 2012) bahwa batasan pengertian tentang strategi humas alternatif optimal yang dipilih untuk ditempuh guna mencapai tujuan humas dalam kerangka suatu rencana humas.

Teori mengenai inovasi dalam penyebarluasan informasi, adalah sebuah teori yang mempelajari cara-cara dimana teknologi dan konsep terbaru diadopsi dalam berbagi sektor pada kehidupan sehari-hari masyarakat.

Berdasarkan landasan teoritis, kerangka kebijakan, dan bukti empiris tersebut, penelitian ini menempatkan humas Setda Provinsi Kalimantan Tengah sebagai fokus pusat informasi kegiatan pemerintahan provinsi. Tujuannya adalah mengevaluasi sejauh mana humas mampu menjalankan peran manajemen komunikasi dua arah, mengatasi hambatan infrastruktur dan fragmentasi antar-SKPD, serta meningkatkan pemahaman dan partisipasi publik terhadap program prioritas daerah.]

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah. Regulasi yang berfungsi sebagai acuan strategis agar instansi pemerintah dapat membangun pengelolaan informasi

yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Menyadur teori-teori yang ada dalam penelitian sebelumnya oleh peneliti lainnya, ditemukan adanya persamaan dalam pengaplikasian strategi kehumasan dalam penyebaran informasi oleh humas pemerintah daerah, sedangkan untuk perbedaannya terdapat dalam pola, aksi dan pengaplikasiannya. Hal ini menjadi celah kekurangan tersendiri yang dipergunakan sebagai evaluasi bersama untuk peningkatan dan perbaikan strategi kehumasan kedepannya.

Temuan penelitian diharapkan memberi rekomendasi operasional untuk memperkuat peran humas sebagai pilar transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik di era desentralisasi.

Dari latar belakang inilah, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai strategi bagaimana yang telah dilakukan humas sekretariat Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengatasi permasalahan yang ada yang menjadikan penghubung antara pemerintah ke masyarakat.

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Strategi Humas dalam Penyebarluasan Informasi melalui media digital pada Bagian Humas, Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Humas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyebarluasan informasi terkait kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai focus utamanya melalui media digital.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji secara mendalam peran, strategi, dan hambatan Humas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyebarluasan informasi kegiatan pemerintah melalui media digital. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena

komunikasi pemerintahan berdasarkan perspektif para pelaku, dokumen resmi, dan praktik komunikasi yang berlangsung di lapangan.

Lokasi penelitian berada di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya pada unit yang menangani kehumasan, protokol, dan kerja sama. Objek penelitian adalah aktivitas kehumasan dalam penyebarluasan informasi kegiatan pemerintah provinsi melalui media digital, media konvensional, serta layanan informasi publik.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas kehumasan, seperti pejabat struktural, staf humas, dan pengelola informasi publik. Dalam konteks penelitian terdapat 12 informan kunci saat dilakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan judul penelitian yang dibuat yaitu terdiri dari Kepala Sub. Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Setda Provinsi Kalteng, Ibu Ingelina Alvelicha, S.STP., M.A.P, staf humas Setda Provinsi Kalteng diantaranya Ibu Dewi Yulianti, S.Sos., Elsa Nur salbila, S.Pd., Irawulan, S.Sos., Ghozali Rahman, S.H., Benito Zuares, S.I.Kom., Eka Supriyaningsih, S.S., Joko Prabowo, S.Pd, dan Akhmad Zikrian Hidayat, S.H, serta jurnalis, Ibu Katerina dari Langkah Kalteng dan tokoh masyarakat Bapak Bambang Supriyono yang memberikan gambaran bahwa kanal digital lebih cepat menjangkau publik perkotaan, sedangkan radio dan konferensi pers masih menjadi solusi yang lebih tepat untuk wilayah yang akses internetnya terbatas atau bahkan bisa dikatakan sulit dijangkau.

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, antara lain struktur organisasi dan tata kerja, arsip publikasi, siaran pers, dokumentasi kegiatan, data PPID, serta statistik penggunaan media digital resmi pemerintah daerah.

Indikator penelitian dan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti sejalan dengan teori RACE (Cutlip, Center, & Broom, 2006) dan Komunikasi Dua Arah

atau *two-way communication* (Grunig & Hunt, 1984). peneliti melakukan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi bersama informan. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai tugas, fungsi, strategi komunikasi, serta hambatan yang dihadapi humas. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses penyebaran informasi dan aktivitas komunikasi publik. Studi dokumentasi digunakan untuk menelaah dokumen kelembagaan, arsip berita, laporan kegiatan, dan data publikasi digital yang mendukung analisis penelitian.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, informasi yang diperoleh diseleksi dan difokuskan pada aspek yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara naratif agar hubungan antar-tema dapat dipahami dengan jelas. Tahap akhir dilakukan dengan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran mengenai peran Humas Setda Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyebarluasan informasi kegiatan pemerintah.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari informan yang berbeda, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas yang baik.

Kerangka analisis penelitian ini menggunakan teori RACE dari Cutlip, Center, dan Broom serta teori komunikasi dua arah dari Grunig dan Hunt. Teori RACE digunakan untuk menelaah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi komunikasi humas, sedangkan teori komunikasi dua arah digunakan untuk melihat hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat dalam proses penyebarluasan informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Humas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berperan sebagai penghubung utama antara pemerintah provinsi dan masyarakat melalui strategi komunikasi multikanal yang selaras dengan tahap RACE, yaitu:

- *Research* : terlihat dari upaya humas membaca kebutuhan informasi publik melalui pemantauan isu, masukan media, dan respon masyarakat.
- *Action/planning* : tampak dalam pemilihan saluran komunikasi, penyesuaian materi siaran, serta penguatan pesan sesuai karakter audiens.
- Tahap *communication* : diwujudkan melalui publikasi aktif di media digital dan konvensional
- *Evaluation* terlihat dari pengukuran keterlibatan publik dan umpan balik dari masyarakat serta media.

penelitian/fakta, perencanaan, pelaksanaan komunikasi, dan evaluasi. Temuan ini juga selaras dengan pandangan Cutlip, Center, dan Broom bahwa praktik humas yang efektif harus dimulai dari identifikasi masalah, dilanjutkan perencanaan program, implementasi, dan evaluasi berkelanjutan.

Secara umum, Humas Setda Kalteng telah memanfaatkan media digital dan media konvensional secara bersamaan, terutama situs web setda.kalteng.go.id, juga [@sekretariat.daerah.kalteng](https://www.instagram.com/sekretariat.daerah.kalteng) dan [@biroadpimkalteng](https://www.instagram.com/biroadpimkalteng), serta radio lokal, dan konferensi pers. Pola ini mendukung gagasan strategi humas pemerintah era digital yang menekankan integrasi media konvensional dan media sosial untuk memperluas jangkauan informasi publik.

Berdasarkan wawancara, para informan menilai bahwa konten tentang infrastruktur memperoleh tingkat keterlibatan publik paling tinggi, bahkan mencapai 85% pada unggahan tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa isu yang berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat cenderung memicu respon lebih besar, sehingga pengemasan pesan yang konkret

dan relevan menjadi faktor penting dalam efektivitas humas pemerintah. Di sisi lain, informan juga menyoroti bahwa koordinasi antar-SKPD belum sepenuhnya sinkron, sehingga arus informasi sering terlambat atau tidak seragam dan masih membutuhkan kecepatan serta ketepatan dalam menanggapi dalam menyampaikan informasi antar instansi pemerintah di Provinsi Kalimantan Tengah.

PEMBAHASAN TEORETIS

Jika dianalisis, upaya humas dalam usaha penyebarluasan informasi Pemerintah Provinsi kepada masyarakat Kalimantan Tengah dengan menggunakan model RACE dari pandangan Cutlip, Center, dan Broom sudah sejalan dalam pelaksanaannya di lapangan dengan masyarakat yang beragam dan kondisi geografis yang kompleks.

Dari sudut pandang teori komunikasi dua arah Grunig dan Hunt, strategi Humas Setda Kalteng sudah mengarah pada komunikasi dua arah karena tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga membuka ruang tanggapan dari publik, jurnalis, dan tokoh masyarakat. Model dua arah menekankan dialog, saling pengertian, dan penyesuaian antara organisasi dan publik, bukan sekadar penyampaian satu arah. Namun, temuan keterbatasan internet di 12 kabupaten pedalaman menunjukkan bahwa komunikasi simetris belum sepenuhnya optimal karena belum semua masyarakat dapat mengakses kanal digital secara setara.

Pendapat para ahli juga memperkuat hasil tersebut. Strategi humas pemerintah yang efektif idealnya memadukan pemilihan khalayak sasaran, penyusunan pesan yang ringkas dan menarik, pemanfaatan fitur media sosial, serta tindak lanjut atas masukan publik. Selain itu, literatur tentang humas pemerintah di era milenial menegaskan pentingnya kolaborasi pemangku kepentingan dan integrasi media digital serta media konvensional untuk mendukung layanan informasi yang transparan dan berkualitas. Dengan demikian, praktik Humas Setda Kalteng dapat dinilai relevan dengan

kebutuhan komunikasi publik modern, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek koordinasi internal dan pemerataan akses informasi.

PANDANGAN INFORMAN

Kepala Sub. Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan pada Humas Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng, Ibu Ingelina Alvelicha, S.S.TP., M.A.P menekankan bahwa fungsi utama humas adalah menjaga arus informasi agar kebijakan pemerintah dapat dipahami masyarakat secara tepat waktu dan akurat. Staf humas, Ibu Dewi Yulianti, S.Sos, dan rekan humas lainnya menambahkan bahwa media sosial mempercepat distribusi informasi, tetapi tetap membutuhkan dukungan data resmi dari SKPD terkait agar konten yang dipublikasikan tidak menimbulkan bias. Pandangan ini konsisten dengan prinsip RACE, karena kualitas hasil komunikasi sangat bergantung pada ketepatan analisis masalah dan kesiapan materi sebelum publikasi.

Jurnalis yang diwawancarai menilai bahwa konferensi pers dan siaran pers masih penting karena memberikan legitimasi informasi dan memudahkan verifikasi berita. Tokoh masyarakat, terutama dari wilayah yang lebih jauh dari pusat pemerintahan, menilai radio lokal masih relevan karena lebih mudah diakses dibanding internet di beberapa daerah pedalaman. Keterangan ini memperkuat temuan bahwa strategi multikanal merupakan kebutuhan nyata, bukan sekadar pilihan teknis, dalam konteks geografis Kalimantan Tengah yang luas dan beragam tingkat aksesnya.

Selain itu penulis juga melakukan penggalian informasi bersama informan atau narasumber, Kepala Sub. Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Pada Bagian Humas, Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tanggal 5 Maret 2026 yang lalu.

IMPLIKASI PRAKTIS

Temuan penelitian mengarah pada perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia humas

melalui pelatihan keterampilan digital bagi 30 aparatur humas. Penguatan ini penting agar pengelolaan konten, interaksi publik, dan pemantauan respons masyarakat dapat dilakukan lebih cepat dan profesional. Selain itu, kolaborasi dengan media komunitas Dayak dapat menjadi strategi yang lebih inklusif untuk menjangkau masyarakat pedalaman dan memperkuat komunikasi berbasis kearifan lokal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa Humas Setda Provinsi Kalimantan Tengah telah menjalankan fungsi strategis dalam mendukung *good governance* melalui penyediaan informasi, pembangunan citra kelembagaan, dan pembukaan ruang dialog publik. Meski demikian, strategi humas yang dijalankan masih dipengaruhi oleh kesenjangan infrastruktur digital dan koordinasi antar-SKPD, sehingga penguatan komunikasi internal dan eksternal perlu dilakukan secara keseluruhan.

Tantangan dan Hambatan

Berdasarkan hasil penelitian, Humas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan dalam menjalankan fungsinya sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah provinsi dan masyarakat. Hambatan yang paling menonjol adalah keterbatasan akses internet di wilayah pedalaman. Kondisi ini menyebabkan penyebaran informasi melalui media digital belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat, terutama di 12 kabupaten yang memiliki tingkat konektivitas rendah. Akibatnya, saluran komunikasi konvensional seperti radio lokal dan konferensi pers tetap diperlukan sebagai media pelengkap untuk memastikan informasi pemerintah dapat diterima secara merata.

Selain faktor infrastruktur, tantangan lainnya terletak pada koordinasi antar-SKPD yang belum optimal. Dalam praktiknya, humas sering kali menerima data atau informasi dari instansi terkait secara terlambat, sehingga proses publikasi menjadi tidak seragam dan kurang cepat. Situasi ini menunjukkan bahwa komunikasi

internal di lingkungan pemerintah daerah masih perlu diperkuat agar arus informasi dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan konsisten. Dalam kerangka teori RACE, kelemahan koordinasi ini berdampak pada tahap *action/planning* dan *communication* karena pesan yang disampaikan berpotensi tidak sinkron dengan kebutuhan publik.

Dari sisi sumber daya manusia, humas masih memerlukan peningkatan kapasitas, khususnya dalam pengelolaan konten digital, analisis keterlibatan publik, dan respons terhadap isu-isu yang berkaitan dengan komunikasi yang semakin hari perkembangannya semakin cepat. Di era komunikasi publik yang semakin maju dan berkembang pesat secara digital, aparatur humas dituntut tidak hanya mampu menyebarkan informasi, tetapi juga memahami karakter audiens, mengemas pesan secara menarik hingga mudah untuk dipahami, serta merespons masukan masyarakat secara cepat dan tepat. Maka perlu dilakukan peningkatan kompetensi disegala sektor karena tanpa kompetensi yang mumpuni, strategi komunikasi multikanal yang telah diterapkan akan kurang maksimal dalam upaya menghasilkan komunikasi dua arah yang efektif.

Hambatan lain juga muncul pada aspek substansi pesan. Temuan menunjukkan bahwa konten mengenai infrastruktur memperoleh tingkat keterlibatan publik yang tinggi karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, informasi yang terlalu formal dan administratif cenderung kurang menarik perhatian publik. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas humas pemerintah sangat dipengaruhi oleh kemampuan mengemas pesan agar relevan, konkret, dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, humas perlu melakukan penyesuaian pesan berdasarkan karakteristik audiens dan wilayah sasaran baik dari segi bahasa, karakter konten publikasi yang dilakukan yang langsung tersampaikan kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, tantangan dan hambatan yang dihadapi Humas Setda Provinsi Kalimantan Tengah mencerminkan kompleksitas komunikasi pemerintahan

di daerah dengan kondisi geografis luas dan akses digital yang belum merata. Oleh karena itu, penguatan strategi komunikasi tidak hanya perlu dilakukan melalui pemanfaatan media digital, tetapi juga melalui pengembangan kapasitas SDM, perbaikan koordinasi internal, dan kerja sama dengan media komunitas lokal. Langkah-langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa fungsi humas sebagai penyedia informasi, penghubung aspirasi, dan pendukung tata kelola pemerintahan yang baik dapat berjalan lebih optimal.

KESIMPULAN

Penelitian Strategi Humas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai penghubung informasi antara pemerintah provinsi dan masyarakat melalui penerapan komunikasi multikanal yang selaras dengan tahapan RACE. Humas tidak hanya berfungsi menyebarkan informasi, tetapi juga melakukan identifikasi kebutuhan publik, perencanaan pesan, pelaksanaan diseminasi, serta evaluasi respons masyarakat.

Strategi komunikasi yang digunakan dinilai efektif karena memadukan media digital dan media konvensional, seperti situs web resmi, Instagram, radio lokal, dan konferensi pers. Kombinasi saluran ini terbukti penting untuk menjangkau masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah yang luas dan memiliki akses internet belum merata. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi publik pemerintah daerah harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan karakteristik audiens.

Selain itu, konten mengenai infrastruktur memperoleh perhatian publik paling tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih responsif terhadap informasi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan mereka sehari-hari. Dengan demikian, keberhasilan humas pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuan mengemas pesan yang konkret, relevan, dan mudah dipahami.

Penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan, yaitu keterbatasan akses internet di wilayah pedalaman,

koordinasi antar-SKPD yang belum optimal, serta perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia humas. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas humas masih memerlukan penguatan dari sisi internal organisasi maupun dukungan infrastruktur komunikasi.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Humas Setda Provinsi Kalimantan Tengah telah menjalankan fungsinya dengan cukup baik dalam mendukung good governance, tetapi masih perlu pembenahan pada aspek koordinasi, pemerataan akses informasi, dan profesionalitas aparatur. Penguatan pada tiga aspek tersebut akan membuat peran humas semakin optimal sebagai sarana komunikasi publik yang transparan, responsif, dan inklusif.

SARAN

1. Humas Setda Provinsi Kalimantan Tengah perlu memperkuat koordinasi antar-SKPD melalui mekanisme komunikasi internal yang lebih terstruktur agar informasi yang disampaikan kepada publik lebih seragam, cepat, dan akurat.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia humas perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan keterampilan digital, penulisan rilis berita, manajemen media sosial, dan komunikasi krisis.
3. Strategi komunikasi multikanal perlu terus dikembangkan dengan tetap mempertahankan media digital, sekaligus mengoptimalkan radio lokal, konferensi pers, dan media komunitas untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses internet.
4. Humas perlu lebih banyak mengangkat isu-isu yang berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat, seperti infrastruktur, layanan publik, kesehatan, dan pendidikan, karena topik semacam ini lebih mudah menarik perhatian publik.

5. Pemerintah provinsi perlu mendukung penguatan infrastruktur komunikasi di wilayah pedalaman agar distribusi informasi publik dapat berjalan lebih merata dan efektif.
6. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan perspektif masyarakat penerima informasi secara lebih luas, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas strategi humas pemerintah daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat, rahmat dan karuniaNya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, kekuatan, kesabaran dan kesempatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan. Bersama ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberi dukungan, bimbingan dan motivasi sepanjang perjalanan studi di program sarjana Ilmu Komunikasi, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya. yang sebesar-besarnya dengan hati yang tulus kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Bapak Dr. H. Muhammad Yusuf, S.Sos., M.A.P.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Ibu Dr. Rita Rahmaiaty, M.Pd
3. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Bapak Dr. H. Junaidi, S.H., M.I.Kom
4. Bapak Ibu Dosen Penguji terimakasih atas waktu, saran, pemikiran dan kritik konstruktifnya
5. Dosen Pembimbing I, Ibu Annisa Rizki Ananda, M.I.kom atas petunjuk dan arahan Beliau.
6. Dosen Pembimbing II, Ibu Lisnawati, M.I.Kom atas bimbingan yang begitu intens dan

konsultasi yang komunikatif serta edukatif kepada penulis.

7. Putri tercinta yang selalu setia menemani penulis.
8. Keluarga terkasih yang selalu mendukung penulis.
9. Pimpinan, Rekan, Informan dan semua pihak yang telah membantu penulis, selama proses penelitian.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, memberikan balasan dengan segala kebaikan dunia dan akhirat atas keikhlasan dan kebaikannya kepada penulis.

REFERENSI

- Ahmad S. Adnan Putra Rosady (1999) Public Relations Strategy.
- Andersson, R. (2024). Public relations strategizing: A theoretical framework for understanding the doing of strategy in public relations. *Journal of Public Relations Research*, 36(2), 91–112.
- Agustini, V. D., Setyawati, T., Corliana, T., & Dzaljad, R. G. (2024). Digital media utilization in government public relations. In *Proceedings of the 3rd Annual International Conference on Natural and Social Science Education*. Atlantis Press.
- Adi Nugroho Rahutomo (2013) Strategi Humas dalam mempublikasikan informasi pelayanan publik pada PT PLN (Persero) Rayon di Samarinda Ilir; *ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id*.
- Canggara, Hafied, 2007. Pengantar Ilmu Komunikasi, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Dra. Fullchis Nurtjahjani, MM & Shinta Maharani Trivena, SAB., MAB. (2018) Penerbit, Polinema Press
- Everett M Rogers (1964). Difusi inovasi. *Diffusion of Innovations*.
- Frank Jefkins (2018 edisi kelima) Public Relations (humas) Penerbit; Erlangga 2018, Jakarta.
- Firzan Nova (2011) Public Relations: Citra dan Praktek

- Grunig, J. E., Kim, J. N., & Lee, H. (2021). Paradigms of public relations in an age of digitalisation. *Journal of Public Relations*, 25(1), 1–30
- Hung-Baesecke, C. J. F., Chen, R., & Ni, L. (2021). The excellence theory: Origins, contribution and critique. In C. Valentini (Ed.), *Public Relations* (pp. 313–334). De Gruyter.
- Hasan, Erliana, 2005. *Komunikasi Pemerintahan*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Jajuli, A. S. A., Salahudin, S., & Firdaus, M. (2024). E-government public relations: A systematic literature review. *GovSci: Jurnal Ilmu Pemerintahan*
- Ruslan Rusadi (2012) *Manajemen Public Realtions dan Media Komunikasi*. Jakarta; Rajawali Pers.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah.